

## ANALISIS KESENJANGAN INVESTASI ASING (PMA) DI PROVINSI SULAWESI UTARA: Sebuah Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah

Imamudin Yuliadi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Lingkar Selatan, Kasihan Bantul Yogyakarta 55183 Telp +62 274 387656 Fax. +62 274 387646  
E-mail: imamudin2006@yahoo.co.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan investasi asing dan domestik antarprovinsi di Indonesia serta mengidentifikasi seberapa jauh kesenjangan investasi asing dan domestik di antara provinsi di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis tren, analisis regresi disparitas investasi asing dan domestik antarprovinsi di Indonesia. Penelitian ini memasukkan aspek kebijakan pemekaran wilayah sebagai salah satu variabel dalam penelitiannya. Demikian juga mempertimbangkan implikasinya terhadap kemungkinan munculnya kesenjangan investasi PMA/PMDN di daerah tersebut. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa dampak dari kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara dalam jangka pendek relatif belum menunjukkan pengaruh yang berarti namun dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh cukup besar terhadap kesenjangan investasi PMA dalam konteks perekonomian di Kawasan Timur Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya disparitas investasi asing di Sulawesi Utara. Disparitas investasi juga disebabkan oleh perbedaan infrastruktur ekonomi antarwilayah di Indonesia.

**Kata kunci:** economic decentralization, analisis disparitas investasi, dana alokasi umum

**Abstract:** This research aims to know foreign and domestic investment growth among provinces in Indonesia, to identify how many foreign and domestic investment disparity between the provinces in Indonesia, and what factors cause these differences. The research method used is descriptive analysis, trend analysis, regression analysis of foreign and domestic investment disparity between provinces in Indonesia. This research included aspects of regional expansion policy as one of the variables. This research also considered the implications for the possible emergence of an investment gap foreign investment/domestic investment in the area. The results of this research imply that the impact of expansion policy of the province of Gorontalo from North Sulawesi province within short term relatively have not shown significant influence but in the medium and long term have a significant influence on foreign investment gap in the economic context in Eastern Indonesia. The conclusion of this research is that there are disparities issue of foreign investment in North Sulawesi. Disparity investment is also caused by disparity economic infrastructure among region in Indonesia.

**Keywords:** economic decentralization, analisis disparitas investasi, general allocation fund

### PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Utara termasuk wilayah Indonesia yang langsung berbatasan dengan

negara asing yaitu Philipina. Wilayah ini termasuk salah satu daerah yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah dimana provinsi Gorontalo menjadi provinsi sendiri yang sebelumnya merupakan bagian dari

provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya ekonomi yang relatif cukup besar baik dalam sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, industri dan jasa. Namun persoalan yang dihadapi yaitu terbentur pada masih sedikitnya dana investasi yang masuk di daerah ini untuk mendorong potensi ekonomi. Masuknya investasi asing (PMA) menjadi salah satu pilihan strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi Sulawesi Utara.

Pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara tidak lepas dari kebijakan pemekaran wilayah yang diterapkan pemerintah di era reformasi ini. Kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu semangat reformasi untuk mendorong potensi ekonomi daerah meskipun akhir-akhir ini perlu ada evaluasi secara menyeluruh menyangkut efektivitas dan efisiensi kebijakan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan potensi ekonomi daerah.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi daerah dimungkinkan manakala ada kewenangan dari unsur-unsur masyarakat di daerah untuk memanfaatkan potensinya. Namun persoalannya ternyata cukup kompleks karena kecurigaan dan kekhawatiran terjadinya disintegrasi menjadi alasan pemerintah pusat untuk secara hati-hati merumuskan kebijakan otonomi daerah seperti dalam rumusan UU No. 25 tahun 1999 yang dianggap tidak selaras dengan UU No. 22 tahun 1999 karena pemberian kewenangan yang cukup besar tidak diimbangi dengan perubahan mendasar dalam rangka penguatan dari sisi pendanaan. Kekhawatiran akan munculnya kekuatan disintegrasi yang menunggangi semangat otono-

mi daerah menjadi alasan mengapa persoalan otonomi daerah dirumuskan dengan sangat hati-hati dan sifatnya *gradual* di samping mempersiapkan kelengkapan unsur-unsur penunjang di daerah.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah. Dilihat dari potensi ekonomi yang dimiliki relatif cukup besar terutama untuk sumber daya perikanan, perkebunan, pertanian, dan kelautan. Wisata Bahari Bunaken menjadi salah satu magnet ekonomi yang cukup besar yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam laut provinsi Sulawesi Utara dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi untuk menarik sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun pada sisi lain provinsi Sulawesi Utara menghadapi masalah keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah di samping persoalan keterbatasan infrastruktur terutama akses jalan dan listrik. Permasalahan ini yang menjadi kendala utama untuk menggerakkan potensi sumber daya alam pascakebijaksanaan pemekaran wilayah di provinsi Sulawesi Utara.

Investasi dalam perekonomian merupakan motor penggerak yang dapat memperluas kapasitas produksi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan investasi di samping dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi juga sekaligus dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja. Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi dapat berkembang

dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun di samping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh *Roy W Bahl* (1997) tentang evaluasi dampak reformasi fiskal intrapemerintah di China menyatakan bahwa reformasi fiskal secara menyeluruh di China pada tahun 1994 mengubah struktur pajak-pajak penting, mengubah tanggungjawab administrasi perpajakan dan menyempurnakan pengaturan-pengaturan bagi hasil. Selain itu dilakukan pemangkasan kemampuan daerah untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam memobilisasi dana.

Isu penting dari penelitian tersebut adalah porsi penerimaan daerah setelah pembagian menjadi bertambah besar. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi yaitu *pertama*, formula pembagian yang dilaksanakan tahun 1988 dapat dinegosiasikan untuk lebih menguntungkan pemerintah daerah. *Kedua*, kinerja ekonomi yang buruk dan bencana alam tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk mencapai jumlah yang telah ditetapkan. *Ketiga*, pemerintah daerah menggunakan kewenangannya untuk memberikan konsesi pajak dan kontrak yang menguntungkan dan hal ini mengurangi aliran penerimaan ke pemerintah pusat.

*Francois Vaillancourt* (1996) melalui kajian tentang aspek pendanaan infrastruktur pada keuangan pemerintah daerah di Maroko dan Tunisia. Penelitian ini mengkaji mengenai masalah sistem pendanaan sektor investasi lokal. Tarif pajak yang dipungut secara terpusat ditetapkan oleh pemerintah pusat sedangkan tarif pajak daerah ditetapkan secara terpusat atau lokal tetapi masih dalam interval yang ditetapkan pusat. Transfer dana dari

pusat ke daerah memiliki dua peran utama yaitu *pertama*, dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan tertentu dimana daerah tidak mampu memenuhi secara baik. *Kedua*, dana ini digunakan untuk pemerataan potensi pajak di antara pemerintah-pemerintah daerah.

*Richard M Bird dan Ariel Fiszbein* (1996) melakukan penelitian tentang peran pokok pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal di Kolumbia. Kunci untuk memahami hubungan fiskal intrapemerintahan di Kolumbia adalah sistem transfer intrapemerintahan. Sistem ini memiliki tiga elemen dasar yaitu *situado fiscal (SF)*, *participaciones municipales (PM)*, dan *sistema nacional de cofinanciacion (SNC)*. SF terdiri dari 24,5 persen penerimaan rutin nasional ditransfer ke departemen untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. PM juga terdiri dari suatu persentase dari penerimaan rutin nasional yang meningkat secara tahunan ke tingkat maksimum 22 persen ditransfer ke Dati II untuk investasi sosial atas dasar formula rumit yang secara keseluruhan berpihak pada Dati II yang lebih kecil dan lebih miskin. Sedangkan SNC memberikan pembiayaan atas proyek subnasional atas dasar dana pendamping berjumlah lebih dari 0,8 persen dari PDB.

*Ernesto Rezk* (1996) melakukan penelitian tentang *federalisme fiskal* dan desentralisasi di Argentina. Desentralisasi pengeluaran terutama berlangsung melalui delegasi yang bersama konsentrasi pemungutan pajak yang demikian besar pada pusat menggiring derajat otonomi keuangan ke arah lebih kecilnya bagian subnasional dan pertanggungjawaban fiskalpun beralih tangan dikarenakan akuntabilitas yang melekat pada sumber penerimaan. Sistem bagi hasil merupakan mekanisme koordinasi pajak yang lebih disukai di Argentina tidak saja antara pusat dan provinsi tetapi juga antara provinsi dan Dati II.

Jadi mengkaji hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat aspek orijinalitas dari penelitian tentang penyusunan model Dana Alokasi Pemekaran Wilayah (DAPW) untuk mengatasi ketimpangan investasi PMA/PMDN dan ketimpangan fiskal sebagai dampak kebijakan pemekaran wilayah di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) untuk mewujudkan keadilan ekonomi nasional. Aspek yang belum dikaji dari penelitian *Edy Suandi Hamid* yang menjadi salah acuan dalam penelitian ini yaitu tidak memasukkan aspek kebijakan pemekaran wilayah sebagai salah satu variabel dalam penelitiannya. Demikian juga tidak mempertimbangkan implikasinya terhadap kemungkinan munculnya kesenjangan investasi PMA/PMDN di daerah tersebut.

Strategi untuk mengundang investor asing (PMA) ke daerah merupakan langkah strategis sekaligus cukup berat karena menuntut kesiapan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air minum, jaringan telekomunikasi menjadi kendala utama dalam menarik investor asing ke daerah. Adanya kepastian hukum menyangkut pajak, ijin usaha, pemanfaatan lahan juga menjadi kendala paling besar dalam mendorong masuknya investasi asing di daerah.

## METODE

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari sumber-sumber yang kredibel. Di samping itu untuk mendukung kedalaman analisis penelitian ini juga mempertimbangkan hasil-hasil kajian dan penelitian lain yang relevan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi dan kompilasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data dan la-

poran realisasi pembangunan daerah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Bappeda, dan kantor-kantor dinas yang terkait.

## Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis yaitu analisis kesenjangan investasi, analisis regresi, dan analisis kesenjangan fiskal. Model analisis kesenjangan investasi sebagai berikut:

$$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n} \quad (1)$$

*dimana:* r adalah tingkat ketimpangan investasi di provinsi – i,  $I_i$  adalah nilai investasi di provinsi-i, I adalah nilai investasi total,  $f_i$  adalah jumlah penduduk di provinsi-i, n adalah jumlah total penduduk.

Analisis regresi untuk mengetahui pengaruh perubahan variabel kurs dan tingkat bunga terhadap tingkat investasi di provinsi – i:

$$I_i = \alpha_0 + \alpha_1 r + \alpha_2 \text{Kurs} \quad (2)$$

*dimana:* I adalah PMA, r adalah tingkat bunga simpanan, Kurs adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

Model analisis kesenjangan fiskal vertikal untuk mengetahui kesenjangan fiskal antara daerah sebagai berikut:

$$KF = 1 - \left( \frac{TR_{sp} + TR_{gp} + REV_{sh} + B}{EXP} \right) \quad (3)$$

*dimana:* KF adalah ketimpangan fiskal vertikal,  $TR_{sp}$  dan  $TR_{gp}$  adalah penjumlahan subsidi daerah otonom (SDO) ditambah bantuan pembangunan (Inpres) untuk periode sebelum otonomi,  $TR_{sp}$  adalah dana alokasi khusus (DAK) untuk periode setelah otonomi,

$TR_{gp}$  adalah dana alokasi umum (DAU) untuk periode setelah otonomi, B adalah pinjaman daerah,  $REV_{sh}$  adalah bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil bukan pajak (BHBP), EXP adalah total pengeluaran APBD

Formula lain untuk menghitung kesenjangan fiskal vertikal adalah:

$$V = 1 - [(G1 + G2) / E] \quad (4)$$

$$V1 = 1 - [(G1 + G2 + B) / E] \quad (5)$$

*dimana:* G1 dan G2 adalah penjumlahan bantuan pembangunan (Inpres) ditambah Subsidi Daerah Otonom (SDO) untuk periode sebelum otonomi, G1 adalah dana alokasi umum (DAU) untuk periode setelah otonomi, G2 adalah dana alokasi khusus (DAK) untuk periode setelah otonomi, B adalah pinjaman daerah, E adalah total pengeluaran APBD

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara

*Kondisi Geografis.* Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan

merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di utara garis katulistiwa. Batas wilayah provinsi Sulawesi Utara adalah sebelah utara Laut Sulawesi, Samudera Pasifik dan Republik Philipina, sebelah timur dengan Laut Maluku, sebelah selatan Teluk Tomini dan sebelah barat provinsi Gorontalo.

Wilayah provinsi Sulawesi Utara meliputi daratan dan lautan di mana sebagian besar wilayah dataran terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit yang diselingi lembah yang membentuk dataran. Luas provinsi Sulawesi Utara 15.272,44km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 13 daerah kabupaten/kota. Wilayah daratan juga terdapat banyak gunung berapi di antaranya Gunung Klabat (1895m) di Minahasa Utara, Gunung Lokon (1579m), Gunung Mahawu (1331m) di Tomohon, Gunung Soputan (1789m) di Minahasa, Gunung Dua Saudara (1468m) di wilayah Bitung, Gunung Awu (1784m), Gunung Ruang (1245m), Gunung Karangetan (1320m), Gunung Dalage (1165m) di wilayah Sangihe dan Talaud, Gunung Ambang (1689m), Gunung Gambula (1954m), Gunung Batu Balawan (1970m) di wilayah Bolaan Mongondow.

Daerah Sulawesi Utara mempunyai

Tabel 1. Rekapitulasi Pulau di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni	Tidak Berpenghuni
Kota Manado	3	3	-
Kota Bitung	17	1	16
Kab. Bolmong	17	4	13
Kab. Bolmong utara	6	-	6
Kab. Minahasa utara	19	7	12
Kab. Minahasa Tenggara	24	3	21
Kab. Minahasa Selatan	4	-	4
Kab. Kep. Talaud	16	7	9
Kab. Kep. Sangihe	105	27	78
Kab. Kep. Sitaro	47	7	40
Jumlah	258	59	199

Sumber: www.sulut.go.id

**Tabel 2. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Estimasinya (%)**

Sektor	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Pertanian	21,52	21,54	21,55	21,58	21,60	21,60
Industri	32,80	32,94	33,09	33,28	33,49	33,49
Jasa-jasa	45,68	45,53	45,36	44,91	44,91	44,91

Sumber: Bank Indonesia  
\*) Angka estimasi

beberapa danau yang potensial bagi pengembangan sektor pariwisata, pengairan dan energi yaitu danau Tondano seluas 4.278ha di kabupaten Minahasa dan danau Moat seluas 617ha di kabupaten Bolaang Mongondow. Di daratan juga mengalir sungai-sungai yang berfungsi untuk pengairan dan sumber pembangkit tenaga listrik di samping untuk keperluan air minum.

Wilayah Sulawesi Utara terdiri dari daerah yang dikelilingi pulau-pulau baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau yang ada di Sulawesi Utara sebagaimana dalam *Tabel 1*.

Dari *Tabel 1* terlihat bahwa jumlah pulau di Sulawesi Utara cukup banyak yaitu 258 buah dan sebagian besar tidak berpenghuni yaitu 199 buah dan hanya 59 yang berpenghuni. Keadaan ini membuka kerawanan sosial dan politik karena berpotensi digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan setempat.

Iklim di wilayah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh Angin Muson. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000–3000 mm dan jumlah hari hujan 90–139 hari. Suhu udara rata-rata 25°C dengan suhu udara minimum 22,1°C dan maksimum 30°C. Kelembaban udara tercatat 73,4 persen di mana setiap kenaikan 100m akan menurunkan suhu sekitar 0,6°C.

*Keadaan Ekonomi.* Struktur perekonomian di provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari kontribusi sektor-sektor ekonomi lebih banyak di topang oleh sektor industri dan jasa. Sedangkan peranan sektor pertanian relatif stabil. *Tabel 2* menjelaskan struktur ekonomi provinsi Sulawesi Utara dan estimasinya.

Angka pada *Tabel 2* menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Sulawesi Utara didominasi sektor jasa. Keadaan ini bisa dimaklumi mengingat Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata andalan khususnya wisata bahari. Pada tahun 2008 kontribusi sektor jasa sebesar 44,91 persen, sektor industri 33,49 persen dan sektor pertanian 21,58 persen. Tahun 2009 dan 2010 diprediksikan tidak mengalami perubahan yang berarti dimana sektor jasa tetap menjadi sektor andalan. Sulawesi Utara terkenal dengan wisata bahari Bunaken yang terkenal di mancanegara. Kunjungan wisatawan domestik dan asing mendorong perkembangan sektor-sektor terkait seperti perhotelan, transportasi, rumah makan, dan jasa pendukung lainnya. Perkembangan struktur perekonomian Sulawesi Utara dilihat dari lapangan usahanya dapat dilihat pada *Tabel 3*.

Data pada *Tabel 3* menunjukkan bahwa kontribusi sektor primer terutama sektor pertanian relatif besar yaitu Rp.5.504.678 juta, namun masih di bawah gabungan sektor jasa-jasa yaitu Rp.4.274.508 juta dengan sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti

**Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara Menurut Harga Berlaku Tahun 2008**

Lapangan Usaha	Nilai (juta rupiah)
Pertanian	5.504.678
Pertambangan dan Penggalian	1.252.530
Industri Pengolahan	2.249.069
Listrik, Gas dan Air Bersih	225.256
Bangunan	5.062.405
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.522.099
Pengangkutan dan Komunikasi	3.189.373
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.563.068
Jasa-jasa	4.274.508
PDRB	27.842.985

Sumber: BPS, Sulawesi Utara dalam Angka

perdagangan, hotel dan restoran yaitu Rp.4.274.508 juta. Dari *Tabel 3* memang terlihat bahwa provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang potensial untuk dikembangkan sektor yang berkaitan pertanian dan kelautan serta pariwisata bahari.

#### *Pemekaran Wilayah di Sulawesi Utara.*

Fenomena pemekaran wilayah sebagai bentuk kesadaran masyarakat daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan juga terjadi di Sulawesi Utara baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Angin

reformasi tahun 1998 menjadi titik awal berkembangnya semangat masyarakat daerah dalam menentukan hak-hak politik dan ekonominya. Bahkan kota Bitung yang merupakan pemekaran dari kabupaten Minahasa telah terwujud sejak 15 Agustus 1990. Fenomena pemekaran wilayah mencapai momentumnya pascareformasi tahun 1998 dengan maraknya daerah-daerah yang menuntut pembentukan wilayah baru. Beberapa daerah memang rasional untuk menjadi wilayah baru karena potensi sumberdaya alam dan manusianya cukup memadai. Namun juga

**Tabel 4. Kebijakan Pemekaran Wilayah di Sulawesi Utara**

Kabupaten/Kota	Pemekaran dari Wilayah Kabupaten/Kota	Waktu
Kepulauan Talaud	Kepulauan Sangihe Talaud	10 April 2002
Minahasa Selatan	Minahasa	25 Februari 2003
Minahasa Utara	Minahasa	18 Desember 2002
Kota Tomohon	Minahasa	25 Februari 2003
Kota Bitung	Minahasa	15 Agustus 1990
Kota Kotamobagu	Bolaang Mongondow	2 Januari 2007
Bolaang Mongondow Utara	Bolaang Mongondow	2 Januari 2007
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kepulauan Sangihe	2 Januari 2007
Minahasa Tenggara	Minahasa Selatan	2 Januari 2007
Bolaang Mongondow Timur	Bolaang Mongondow	24 Juni 2008
Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Mongondow	24 Januari 2008

tidak sedikit karena pertimbangan pragmatis dari beberapa elit daerah. *Tabel 4* menjelaskan kebijakan pemekaran wilayah di Sulawesi Utara:

Dari *Tabel 4* terlihat bahwa kebijakan pemekaran wilayah di provinsi Sulawesi Utara mulai marak sejak tahun 2000 pasca pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan pemekaran wilayah yang cukup signifikan adalah pembentukan provinsi baru yaitu provinsi Gorontalo. Kebijakan pemekaran wilayah yaitu pembentukan provinsi Gorontalo menjadi provinsi ke-30 di Indonesia sejak 22 Desember 2000. Keadaan ini membawa implikasi baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Dari aspek politik jelas kebijakan pemekaran wilayah akan menambah jabatan politik dan unit organisasi dengan membawa implikasi menambah beban anggaran operasional daerah. Dari aspek ekonomi kebijakan pemekaran wilayah memberi peluang bagi daerah untuk berkembang lebih maju.

**Investasi di Sulawesi Utara.** Nilai investasi PMA di Sulawesi Utara juga mengalami perkembangan yang sama pascakebijakan pemekaran wilayah. *Tabel 5* menjelaskan perkembangan investasi PMA di Sulawesi Utara.

Data nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah pascakebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo pada tahun 2000 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2000 nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah sebesar 25,5 milyar rupiah yang sebelumnya pada tahun 1999

sebelum kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo nilai investasi PMA sebesar 24,1 milyar rupiah. Pada tahun 2001 mengalami penurunan cukup tajam menjadi 1,2 milyar rupiah artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah berdampak signifikan terhadap iklim investasi PMA di Sulawesi Utara. Pada tahun 2002 relatif mengalami peningkatan menjadi 127,8 milyar rupiah dan juga tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 165,7 milyar rupiah. Pada tahun 2005 besarnya nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah sebesar 470 milyar dan mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 59,4 milyar rupiah. Tahun 2007 mengalami peningkatan signifikan menjadi 177,5 milyar rupiah. Dari data tersebut terlihat bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi Gorontalo berdampak signifikan terhadap penurunan investasi PMA pada tahun-tahun awal.

**Analisis Kesenjangan Investasi PMA di Sulawesi Utara.** Peranan investasi PMA sangat penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, mendorong peningkatan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuknya investasi PMA di daerah akan menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) bagi pengembangan ekonomi lokal melalui transformasi teknologi, pengembangan ekonomi unggulan dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah. Analisis kesenjangan investasi PMA di

**Tabel 5. Nilai Investasi PMA yang Disetujui Pemerintah di Sulawesi Utara (Milyar rupiah)**

Tahun	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Investasi	157,4	24,1	25,5	1,2	127,8	165,7	374,5	470	59,4	177,5	

Sumber: BPS, indikator ekonomi

provinsi Sulawesi Utara ditinjau dalam konteks perekonomian di Sulawesi dan di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN). Analisis kesenjangan investasi PMA di sini adalah yang telah disetujui pemerintah. Analisis kesenjangan investasi PMA dalam lingkup perekonomian di kawasan Pulau Sulawesi dapat dilihat pada *Tabel 6*.

Hasil analisis kesenjangan investasi PMA provinsi Sulawesi Utara yang disetujui pemerintah menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun dalam konteks perekonomian Sulawesi. Kesenjangan (gap) investasi PMA dilihat dalam kaitan dengan nilai total investasi Sulawesi Utara dibandingkan dengan nilai investasi di seluruh provinsi di pulau Sulawesi yang meliputi provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kesenjangan (gap) investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan total investasi di pulau Sulawesi ditunjukkan dengan nilai pada kolom ( $I_i - I$ ). Pada tahun 1999 yaitu satu tahun sebelum kebijakan pemekaran wilayah

provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara besarnya kesenjangan (gap) sebesar -117.7. Kemudian pada tahun 2001 yaitu satu tahun pascakebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo pada tahun 2000 besarnya gap menjadi -79.9 artinya besarnya kesenjangan semakin kecil menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara dalam konteks perekonomian di Sulawesi relatif kurang berdampak terhadap kesenjangan investasi di provinsi Sulawesi Utara. Setelah tahun ke dua yaitu tahun 2002 kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo berpengaruh signifikan terhadap investasi PMA di provinsi Sulawesi Utara terlihat dari besarnya gap yang cukup besar yaitu -379.1. Angka relatif stabil sampai dengan tahun 2005 dan kemudian menurun pada tahun 2006 menjadi -155.1. Pada tahun 2007 meningkat menjadi -6170.5 yang menyiratkan bahwa meningkatnya gap investasi PMA di Sulawesi Utara terasa setelah berjalan beberapa tahun di samping adanya pengaruh eksternal lainnya.

**Tabel 6. Analisis Kesenjangan Investasi PMA Provinsi Sulawesi Utara dalam Konteks Perekonomian Sulawesi**

Tahun	$I_i - I$	$(I_i - I)^2$	$f_i$	$n$	$f_i/n$	$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n}$
1998	-35.3	1246.09	1956700	14252000	0,137293	171.07945
1999	-117.7	13853.29	1978800	14566700	0,137293	1881.8875
2000	-48.9	2391.21	2000800	14881371	0,134455	321.50954
2001	-79.9	6384.01	2022700	15095500	0,133994	855.41632
2002	-379.1	143716.81	2044800	15312700	0,133536	19191.399
2003	-345.1	119094.01	2067100	15532700	0,133081	15849.094
2004	-316.9	100425.61	2089700	15755900	0,13263	13319.417
2005	-237.4	56358.76	2112400	15981900	0,132175	7449.1922
2006	-155.1	24056.01	2132500	16194200	0,131683	3167.7663
2007	-6170.5	38075070	2152700	16409100	0,131189	4995045.7

Sumber: BPS, (diolah)

*Keterangan:*  $r$  adalah tingkat ketimpangan investasi PMA di provinsi Sulawesi Utara,  $I_i$  adalah nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Sulawesi Utara,  $I$  adalah nilai investasi PMA total di Sulawesi,  $f_i$  adalah jumlah penduduk di provinsi Sulawesi Utara,  $n$  adalah jumlah total penduduk Sulawesi

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai kesenjangan investasi di suatu daerah, maka dianalisis dengan instrumen rasio kesenjangan investasi PMA ( $r$ ) yang mengukur besarnya investasi PMA di suatu daerah dibandingkan dengan nilai investasi PMA total di suatu wilayah dikaitkan dengan jumlah penduduk. Nilai kesenjangan investasi PMA ( $r$ ) di provinsi Sulawesi Utara sebelum kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 1999 relatif cukup baik ditunjukkan dengan nilai  $r$  yang cukup kecil yaitu 1881.8875. Pada saat kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari Sulawesi Utara pada tahun 2000 besarnya nilai kesenjangan investasi PMA sebesar 321.50954 dan kemudian meningkat menjadi 855.41632 pada tahun 2001. Gejala peningkatan kesenjangan investasi PMA terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2002 menjadi 19191.399 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo berpengaruh terhadap kesenjangan investasi PMA di provinsi Sulawesi Utara setelah berjalan bebe-

rapa tahun kemudian ditinjau dalam konteks perekonomian di pulau Sulawesi secara keseluruhan.

Analisis kesenjangan investasi PMA provinsi Sulawesi Utara yang disetujui pemerintah dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) dikaitkan dengan jumlah penduduk di kawasan tersebut. Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN) dalam penelitian di sini meliputi pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Maluku Utara, NTT, NTB, dan Papua. *Tabel 7* menunjukkan besarnya nilai kesenjangan investasi PMA yang disetujui pemerintah dalam konteks perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN).

*Tabel 7* menunjukkan bahwa kesenjangan (gap) investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Sulawesi Utara dengan keseluruhan investasi PMA di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN) yaitu pada kolom ( $I_i - I$ ). Dari tabel di atas terlihat bahwa gap investasi PMA di provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan besarnya investasi PMA

**Tabel 7. Analisis Kesenjangan Investasi PMA Provinsi Sulawesi Utara dalam Konteks Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)**

Tahun	$I_i - I$	$(I_i - I)^2$	$f_i$	$n$	$f_i/n$	$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n}$
1998	-426.9	182243.61	1956700	25809600	0.075813	13816.41218
1999	-351.4	123481.96	1978800	26321000	0.07518	9283.313797
2000	-1715.9	2944312.81	2000800	26822371	0.074597	219637.1871
2001	-6709.6	45018732.16	2022700	27233200	0.074273	3343690.405
2002	-666.9	444755.61	2044800	27650500	0.073952	32890.40962
2003	-2208.1	4875705.61	2067100	28073500	0.073632	359006.5744
2004	-862.1	743216.41	2089700	28503000	0.073315	54488.97772
2005	-512.4	262553.76	2112400	28938700	0.072996	19165.28948
2006	-606.1	367357.21	2132500	29341400	0.072679	26699.10946
2007	-6617.8	43795276.84	2152700	29749800	0.07236	3169032.815

Sumber: BPS, (diolah)

*Keterangan:*  $r$  adalah tingkat ketimpangan investasi PMA di provinsi Sulawesi Utara,  $I_i$  adalah nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Sulawesi Utara,  $I$  adalah nilai investasi PMA total di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN),  $f_i$  adalah jumlah penduduk di provinsi Sulawesi Utara,  $n$  adalah jumlah total penduduk di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

secara total di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kesenjangan (gap) investasi PMA pada tahun 1999 yaitu satu tahun sebelum adanya kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara sebesar -351.4-351.4. Kemudian pada tahun 2001 yaitu satu tahun setelah kebijakan pemekaran wilayah berubah menjadi -6709.6 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah menyebabkan peningkatan kesenjangan (gap) investasi PMA yang cukup besar pada tahun pertama. Pada tahun kedua (2002) mengalami penurunan tajam menjadi -666.9 artinya dampak dari kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesenjangan regional berangsur-angsur berkurang seiring adanya kebijakan penunjang di daerah seperti kemudahan dalam berinvestasi dan penurunan bea dan pajak daerah. Pada tahun-tahun selanjutnya kesenjangan investasi PMA berfluktuasi mengikuti dinamika perekonomian baik di tingkat lokal di provinsi Sulawesi Utara maupun secara global di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN).

Analisis kesenjangan investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Sulawesi utara dalam konteks perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN) menjadi jelas dengan melihat nilai  $r$  yang menunjukkan kesenjangan investasi dikaitkan dengan jumlah penduduk. Nilai kesenjangan investasi PMA di Sulawesi Utara dalam konteks analisis kesenjangan investasi di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN) sebelum diterapkannya kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 1999 sebesar 9283.313797. Pada tahun 2001 yaitu satu tahun setelah kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara nilai  $r$  turun menjadi 3343690.405 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan

kesenjangan investasi. Keadaan ini terus mengalami fluktuasi sampai tahun 2003 dan pada tahun 2004 nilai  $r$  turun tajam menjadi 54488.97772. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu dari 2005 sampai 2007 mengalami peningkatan sangat tajam menjadi 19165.28948, 26699.10946 dan 3169032.815.

Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa dampak dari kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara dalam jangka pendek relatif belum menunjukkan pengaruh yang berarti namun dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh yang cukup besar terhadap kesenjangan investasi PMA dalam konteks perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN).

## KESIMPULAN

Strategi pembangunan ekonomi daerah di provinsi Sulawesi Utara melalui kebijakan pemekaran wilayah memerlukan antisipasi dan koordinasi antarinstitusi dan elemen dalam masyarakat yang lebih matang untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Minimnya investasi di daerah terutama investasi asing (PMA) menjadi kendala terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu perlu ada kebijakan yang terpadu, efektif dan efisien untuk dapat menarik investor asing (PMA) ke Sulawesi Utara.

Kebijakan pemekaran wilayah di provinsi Sulawesi Utara memberikan dampak yang bervariasi antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Sehingga dampak yang ditimbulkan juga tidak sama ada yang menimbulkan kesenjangan investasi namun juga ada yang mengurangi kesenjangan investasi antarprovinsi dan antarkabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Faktor yang mempengaruhi terhadap implikasi kebijakan

pemekaran wilayah terhadap kesenjangan antar daerah di samping ketersediaan infrastruktur juga dipengaruhi oleh pemerataan jumlah penduduk antarwilayah di Sulawesi Utara. Sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam menangkap peluang investor asing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sulawesi Utara dalam Angka*, 2006/2007
- Coleman, 1988, "Making Decision Work Business Analysis in Land and Farm Investment" dalam *Journal of Management Strategic*, vol. 23, p. 32 - 56
- Godet, 1994, "Structural Analysis Methods Using Qualitative Approach toward Economics Investment" dalam *Journal of Economics Sciences*, vol. 7
- Hit, Ireland, Hokisson, 1999, *Policy Analysis Models and Concept for Building Competences*, Prentice Hall, Engelwood Cliff
- Yuliadi, Imamudin. 2007, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPFE.
- Yuliadi, Imamudin. 2009, *Ekonometrika Terapan*, Yogyakarta: UPFE.
- Gittinger, J. P., 1986, *Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lembaga Penelitian Tanaman Industri Bogor, 1974, *Pedoman Bercocok Tanam Kelapa*, Bogor.
- Elyas, Nurdin. 2006, *Menjadi jutawan melalui Home Industri Aneka Olahan Kelapa*, Yogyakarta: Absolut.
- Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, Jakarta: Gramedia.
- Elisabeth, Sadoulet, and Alain de Janvry, 1995, *Quantitative Development Policy Analysis*, Baltimore: the John Hopkins University Press.
- Arif, Sritua. 1990, *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik, kumpulan Karangan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tawang Alun, 1992, *Analisa Ekonomi Utang Luar Negeri*, Jakarta: LP3ES.
- Thomas, R Leighton, 1985, *Introductory Econometrics Theory and Application*, first edition, British Library Catalog in Publishing Data, Printed in Singapore
- Tambunan, Tulus. 2001, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*, Jakarta: LP3ES.
- Turnovsky, Stephen J, 1981, *Macroeconomic Analysis and Stabilization Policy*, USA: Cambridge University Press.
- Kirana Jaya, Wihana, 1990, "Seleksi Model Permintaan Uang di Indonesia 1973-1983, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 2 tahun V.
- Zhaoyong Zhang, "China's Exchange Rate Reform and Its Impact on the Balance of Trade and Domestic Inflation", *Asia Pacific Journal of Economics and Business*, vol. 3 No. 2, December 1999.